



REVISI I PERJANJIAN KINERJA 2024

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN



REVISI I PERJANJIAN KINERJA
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Revisi I Perjanjian Kinerja
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Syifa Azzaria, S.Stat	Ahli Pertama - Statistisi, Seksi Rancang Bangun PKB	14/6	
2.	Diperiksa	Dluha My Praba, M.T.	Ketua Tim Kelompok Substansi Rancang Bangun Penimbangan Kendaraan Bermotor, Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	14/6	
3.	Diperiksa	Ayu Nilawati Agustina, SE., M.MTr.	Ketua Tim Kelompok Substansi Pengelolaan Penimbangan Kendaraan Bermotor, Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	14-6-2024	
4.	Disetujui	H. Abdul Karim Akaseh, ST., MM	Kepala Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	19-6-2024	



REVISI I PERJANJIAN KINERJA
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Revisi I Perjanjian Kinerja
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Dwiki Adhitya, S.ST.	Penyusun Rencana dan Program, Seksi Integrasi Moda	14-6-2024	
2.	Diperiksa	Muhammad Isrofi, ST, M.Tr.AP	Ketua Tim Kelompok Substansi Fasilitas Pendukung, Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	14/6/2024	
3.	Diperiksa	Jekky Hendri, S,Sos	Ketua Tim Kelompok Substansi Integrasi Moda, Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	14/6/2024	
4.	Diperiksa	Astri Widiani, A.Md LLAJ, S.E.	Ketua Tim Kelompok Substansi Fasilitas Pendukung, Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	19/6/2024	



REVISI I PERJANJIAN KINERJA
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Revisi I Perjanjian Kinerja
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Riska Mahanani Pratiwi, A.Md LLAJ, S.T.	Penyusun Data Kepegawaian	14/6/2024	
2.	Diperiksa	Yulie Wulandari, SE	Ketua Tim Kelompok Substansi Tata Usaha Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	14/6/24	
3.	Disetujui	Toni Tauladan, S.Si., M.T.	Direktur Prasarana Transportasi Jalan	24-6-2024	



REVISI I PERJANJIAN KINERJA
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Revisi I Perjanjian Kinerja
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Danny Muhammad Muflih, A.Md LLAJ, S.Tr.Tra	Penyusun Bahan Usaha, Kelompok Pengawasan dan Evaluasi	14/6 ²⁴	
2.	Diperiksa	Fitroh,S.ST, MT	Ketua Tim Kelompok Substansi Pengawasan dan Evaluasi, Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana	14/6 ²⁴	
3.	Diperiksa	Rizki Fauzi Rahman, S.SiT, M.Si.	Ketua Tim Kelompok Substansi Penyelenggaraan Kemitraan, Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana	14/6 ²⁴	
4.	Disetujui	Susanty Pertiwi	Kepala Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana	19/6 ²⁴	



REVISI I PERJANJIAN KINERJA
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Revisi I Perjanjian Kinerja
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	M. Alhafiq Wahyu Nabillah, S.T.	Ahli Pertama - Pengendali Dampak Lingkungan, Seksi Rancang Bangun Terminal	14/6 ²⁴	
2.	Diperiksa	Susiani, A.Md LLAJ, S.T., M.T.	Ketua Tim Kelompok Substansi Pengelolaan Terminal, Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan	14/6 ²⁴	
3.	Diperiksa	Y Prihantoko, S.T., M.Sc.	Ketua Tim Kelompok Substansi Rancang Bangun Terminal, Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan	14/6 ²⁴	
4.	Disetujui	Rudy Arya Iskandar, S.T., M.Sc.	Kepala Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan	19/6 ²⁴	



**REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Toni Tauladan, S.Si., M.T.

Jabatan : Direktur Prasarana Transportasi Jalan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K.,

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Juni 2024

Pihak Pertama

Direktur Prasarana Transportasi Jalan

TONI TAULADAN, S.Si., M.T.
NIP. 19700910 199703 1 002

Pihak Kedua

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Irjen Pol. RISYAPUDIN NURSIN, S.I.K.
NRP. 66110433

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK.1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1 Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Rasio	0,64
		IKK 2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	111
		IKK 3 Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	13
2	SK.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A	%	81,50
		IKK 2 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53,75
		IKK 3 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	81,75
3	SK.3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	24,0
4	SK.5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	89
5	SK.1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	74

Kegiatan

1. Pelayanan transportasi darat
2. Penunjang teknis transportasi darat
3. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat

Anggaran

Rp. 37.828.186.000,00
Rp. 38.178.481.000,00
Rp. 22.877.088.000,00

Disetujui

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Irjen Pol. RISYAPUDIN NURSIN, S.I.K.
NRP. 66110433

Jakarta, 24 Juni 2024

Direktur Prasarana Transportasi Jalan

TONI TAULADAN, S.Si., M.T.
NIP. 19700910 199703 1 002

Lampiran I Nota Dinas Direktur Prasarana Transportasi Jalan
Nomor : 195/DPTJ/VII/2024
Tanggal : 24 Juni 2024

Uraian Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sehubungan dengan adanya Revisi ke-8 DIPA Satker Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Nomor: DIPA-022.03.1.352597/2024 tanggal 21 Juni 2024 dan perubahan pimpinan unit kerja maka perlu ditetapkan Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Program yang akan digunakan untuk mencapai Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan Sasaran Kegiatan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan adalah Program Infrastruktur Konektivitas dengan pagu awal sebesar Rp76.006.667.000,00 dan Program Dukungan Manajemen masih dengan pagu sebesar Rp22.877.088.000,00.

**REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	PIC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	SK.1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1 Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	0,64	Rasio	1. Subdit TAJ 2. Subdit Faspim
		IKK 2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	111	Lokasi	Subdit TAJ
		IKK 3 Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	13	Lokasi	Subdit Faspim
2	SK.2 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A	81,50	%	Subdit TAJ
		IKK 2 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	53,75	%	Subdit TAJ
		IKK 3 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	81,75	%	Subdit TAJ
3	SK.3 Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	24,0	%	Subdit PKB
4	SK.5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	89	Nilai	1. Subdit TAJ 2. Subdit PKB 3. Subdit Faspim 4. Subdit KP 5. Subbag Tata Usaha
5	SK.1 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	74	Nilai	Subbag Tata Usaha

Lampiran III Nota Dinas Direktur Prasarana Transportasi Jalan
 Nomor : 195/DPTJ/VII/2024
 Tanggal :24 Juni 2024

**TABEL SEMULA MENJADI
 REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
 DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
 DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target (2023)	Realisasi (2023)	Target Renstra 2024	Target 2024	Revisi I Target 2024	Keterangan
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	SK.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Rasio	0,62	0,64	0,70	0,64	0,64	Target masih sama dengan PK Awal
			IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	105	108	114	111	111	Target masih sama dengan PK Awal
			IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	12	12	25	13	13	Target masih sama dengan PK Awal
2	SK.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A	%	81	94,61	81,50	81,50	81,50	Target masih sama dengan PK Awal
			IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53,7	59,02	53,7	53,75	53,75	Target masih sama dengan PK Awal
			IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	78,6	81,75	83,38	81,75	81,75	Target masih sama dengan PK Awal

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target (2023)	Realisasi (2023)	Target Renstra 2024	Target 2024	Revisi I Target 2024	Keterangan
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	SK.3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	25	24,88	20,0	24,0	24,0	Target masih sama dengan PK Awal
4	SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	88	88	89	89	89	Target masih sama dengan PK Awal
5	SK.1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	73	73,44	74	74	74	Target masih sama dengan PK Awal

**LAMPIRAN REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
 DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN**

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan Definisi		Satuan	Target PK 2024	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	SK. 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan DEFINISI : IKK Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan adalah perbandingan jumlah Kawasan Strategis Nasional (KSN) Prioritas yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan terhadap jumlah Kawasan Strategis Nasional (KSN) Prioritas yang direncanakan untuk diakomodir dan dilayani prasarana transportasi jalan. Jumlah KSN Prioritas yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan adalah jumlah KSN Prioritas yang di dalam wilayah administrasinya (kabupaten/kota) terdapat prasarana transportasi jalan yang beroperasi. Simpul prasarana transportasi jalan adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda transportasi jalan yang berupa terminal tipe A, terminal barang serta fasilitas pendukung dan integrasi moda yang berupa halte. Kawasan Strategis Nasional (KSN) prioritas yang direncanakan untuk dilayani prasarana transportasi jalan meliputi 10 DPP, 9 KI, 8 KEK dan 42 PKN dengan total 69 wilayah KSN.	Rasio	0,64	TERMINAL ANGKUTAN JALAN: 1. Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan; 2. Monitoring Identifikasi Simpul dan Lokasi Terminal Angkutan Jalan. FASILITAS PENDUKUNG DAN INTEGRASI MODA: Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda;	1.0 Tahun 1.0 Tahun 1.0 Tahun	1. Subdit TAJ 2. Subdit Faspim

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan Definisi	Satuan	Target PK 2024	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			IKK 2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi DEFINISI: Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi adalah jumlah terminal tipe A dan terminal barang di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang telah memberikan pelayanan berupa adanya aktivitas kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum, naik-turun penumpang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan. Terminal tipe A dan terminal barang kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah terminal tipe A dan terminal barang yang telah ditetapkan lokasinya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan dan telah diserahkan dari Pemerintah Daerah kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.	Lokasi	111	TERMINAL ANGKUTAN JALAN : Monitoring Operasional dan Pelaksanaan Excellent Service Terminal Angkutan Jalan.	1.0 Tahun	Subdit TAJ
			IKK 3 Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda DEFINISI: Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 serta PP 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Jalan, Fasilitas Pendukung merupakan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar bahu jalan. Fasilitas pendukung meliputi: trotoar, lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte fasilitas khusus penyandang cacat atau manusia lanjut usia, jalur khusus angkutan umum, jalur/lajur sepeda motor, jalur/lajur kendaraan tidak bermotor, parkir pada badan jalan, fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda, dan/atau tempat istirahat.	Lokasi	13	FASILITAS PENDUKUNG DAN INTEGRASI MODA: Survei Pendataan dan Inventarisasi Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Transportasi Jalan.	1.0 Tahun	Subdit Faspim

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan Definisi		Satuan	Target PK 2024	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	SK. 2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A DEFINISI: Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A merupakan rekapitulasi hasil Survey Koresponden pada Terminal Penumpang Tipe A melalui aplikasi Case Management System IKM Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Pengisian survey dilakukan secara periodik setiap bulan oleh penumpang yang diarahkan oleh Petugas Terminal di seluruh Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi di bawah kerwenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang dapat diakses melalui barcode ataupun link survey yang berbeda-beda setiap terminalnya. Barcode untuk mengakses form survey disediakan oleh masing-masing Terminal Tipe A dengan cara di-display melalui poster dan/atau banner ataupun melalui link yang diberikan oleh petugas terminal kepada penumpang di terminal serta disebarakan melalui media sosial masing-masing terminal. Pengisian survey dilakukan dengan cara mengisi data diri dan menjawab pertanyaan terkait dengan pelayanan di terminal dengan memberikan rating dari 1 sampai 6, dengan rating 6 berarti paling memuaskan dan rating 1 paling tidak memuaskan. Rekapitulasi hasil survey seluruh Terminal Tipe A dapat diakses melalui link skm.dephub.go.id dengan cara memasukkan username dan password yang telah terdaftar sebagai admin.	%	81,50	TERMINAL ANGKUTAN JALAN : Survei Kinerja Pelayanan di Terminal Tipe A (Inventarisasi melalui aplikasi Case Management System IKM)	1.0 Tahun	Subdit TAJ
			IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A DEFINISI: IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Penumpang Tipe A adalah rata-rata	%	53,75	TERMINAL ANGKUTAN JALAN: 1. Evaluasi, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja dan Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan;	1.0 Tahun	Subdit TAJ

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan Definisi		Satuan	Target PK 2024	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			dari persentase pemenuhan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal pada Terminal Penumpang Tipe A beroperasi di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal pada masing-masing Terminal Penumpang Tipe A didapatkan dari hasil survei penilaian pemenuhan jenis pelayanan yang diberikan nilai berdasarkan indikatornya dibandingkan dengan nilai maksimal yang bisa didapatkan jika semua jenis pelayanan terpenuhi indikatornya. Berdasarkan Permenhub Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, Standar Pelayanan Terminal Penumpang Tipe-A mencakup: (1) Pelayanan Keselamatan dengan bobot nilai 20%; (2) Pelayanan Keamanan dengan bobot nilai 6%; (3) Pelayanan Keandalan/Keteraturan dengan bobot nilai 18%; (4) Pelayanan Kenyamanan dengan bobot nilai 36%; (5) Pelayanan Kemudahan/Keterjangkauan dengan bobot nilai 18%; (6) Pelayanan Kesenyamanan dengan bobot nilai 2%. Survei pemenuhan Standar Penyelenggaraan Terminal pada masing-masing Terminal Penumpang Tipe A dilakukan secara online dengan menyebar kuisioner google form ke seluruh Terminal Tipe A yang beroperasi di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Pengisian kuisioner dilakukan dengan menjawab pertanyaan terkait jenis-jenis pelayanan sesuai dengan kondisi di terminal masing-masing. Rekapitulasi hasil pengisian kuisioner seluruh Terminal Tipe A yang beroperasi di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dapat dilihat di akun google drive yang digunakan untuk membuat form kuesioner.				2. Uji Kompetensi Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 3. Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal.	1.0 Tahun 76.0 Unit	

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan Definisi		Satuan	Target PK 2024	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A DEFINISI : IKK Persentase penerapan SMART Terminal Penumpang Tipe A adalah presentase penerapan digitalisasi di Terminal Penumpang Tipe A yang meliputi : 1. Presentase terminal yang melakukan pelaporan data produksi di SIASATI dan/atau Terminal Online System dengan bobot 74%; 2. Presentase terminal yang dipasang mesin check in tiket dan passenger gate dengan bobot 8,4%; 3. Presentase terminal yang dipasang vehicle gate, panel informasi digital dan CCTV dengan bobot 17,6%. Bobot nilai ditentukan berdasarkan fokus tujuan pada pelaporan data produksi secara online melalui system. Langkah tersebut merupakan langkah step by step menuju terminal yang smart melalui digitalisasi terminal. Latar belakang yang mendasari rumusan IKK tersebut yaitu karena terdapat perubahan pelaporan data produksi terminal yang semula dilaporkan secara manual kemudian direkap oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan berubah menjadi input melalui sistem online sehingga sebagai tahap awal digitalisasi perencanaan 5 tahun melalui Rensta 2020 s.d. 2024 mengutamakan Terminal Penumpang Tipe A di seluruh Indonesia untuk melaporkan data produksi secara online sehingga presentase terminal yang melakukan pelaporan data produksi di SIASATI dan/atau Terminal Online System berkontribusi paling besar yaitu dengan bobot 74%. SIASATI dapat diakses melalui https://siasati.dephub.go.id/. Selanjutnya dalam rangka menuju terminal yang smart Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merencanakan akan mengaplikasikan digitalisasi terminal dengan memasang alat yang dapat mengirimkan data Terminal secara realtime yaitu mesin check in tiket, passenger gate, vehicle gate, panel informasi digital dan CCTV. Akan tetapi karena besarnya jumlah Terminal	%	81,75	TERMINAL ANGKUTAN JALAN : 1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 2. Bimbingan Teknis Rancang Bangun Terminal Angkutan Jalan.	1.0 Tahun 1.0 Tahun	Subdit TAJ

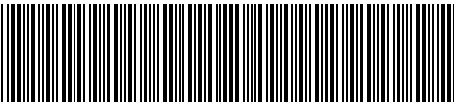
No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan Definisi		Satuan	Target PK 2024	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Penumpang Tipe A di seluruh Indonesia, sehingga pengaplikasian alat-alat tersebut dilakukan secara bertahap, sehingga dalam indikator kinerja diberikan bobot penilaian sebesar 8,4% dan 17,6%. Vehicle gate, panel informasi digital dan CCTV memiliki bobot yang lebih besar dikarenakan merupakan cerminan dari terminal data produksi Terminal yaitu kendaraan angkutan umum yang keluar masuk Terminal Presentase-presentase di atas didapatkan dari data jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang memenuhi masing-masing kriteria dibandingkan dengan jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi dalam kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dikarenakan pada saat ini Terminal Penumpang Tipe A di Indonesia berada dalam kewenangan BPTJ (Pemerintah Pusat) untuk Terminal Penumpang Tipe A di wilayah Bodetabek, kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk Terminal Penumpang Tipe A di wilayah DKI Jakarta, kewenangan swasta dan kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk Terminal Penumpang Tipe A yang tidak diserahkan ke pemerintah pusat.					
3	SK. 3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat DEFINISI: Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat merupakan perbandingan jumlah angkutan barang yang melanggar di UPPKB terhadap jumlah angkutan barang yang masuk ke UPPKB. Berdasarkan Permenhub Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan, pasal 5 ayat (2) menyatakan jenis pelanggaran angkutan barang di UPPKB meliputi: - tata cara pemuatan barang; - dimensi kendaraan Angkutan Barang; - tekanan seluruh sumbu dari/atau setiap sumbu kendaraan Angkutan Barang;	%	24,0	PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR : - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penimbangan Kendaraan Bermotor; - Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor; - Monitoring Pelaksanaan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor; - Monitoring Pendampingan Kerjasama Operasional Fasilitas Penimbangan	1.0 Tahun 1.0 Tahun 1.0 Tahun 1.0 Tahun	Subdit PKB

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan Definisi		Satuan	Target PK 2024	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				d. dokumen Angkutan Barang; e. kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa; dan f. jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan.			dengan Pihak Kedua; 5. Kerjasama Pengelolaan Operasional UPPKB dengan Pihak Kedua; 6. Pemeliharaan perangkat WDIM di Balonggandu; 7. Pemeliharaan perangkat WDIM di Kulwaru; 8. Pemeliharaan perangkat WDIM di Losarang; 9. Pemeliharaan dan Penerimaan ulang Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Portabel di Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.	1.0 Paket 2.0 Lajur 1.0 Lajur 1.0 Lajur 3.0 Lajur	
4	SK. 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat DEFINISI: Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari: a) Aspek Perencanaan; b) Aspek Kepegawaian (SDM); c) Aspek Keuangan; Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), penginputan aplikasi e-performance. Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin. Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja.	Nilai	89	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana; 2. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor; 3. Bimbingan Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Bimbingan Teknis Perawatan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 5. Sertifikasi Kompetensi Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 6. Bimbingan Teknis Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 7. Sosialisasi Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda;	18.0 Rekomendasi Kebijakan 1.0 Tahun 1.0 Tahun 1.0 Tahun 1.0 Tahun 1.0 Tahun	1. Subdit TAJ 2. Subdit PKB 3. Subdit Faspim 4. Subdit KP 5. Subbag Tata Usaha

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan Definisi		Satuan	Target PK 2024	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							8. Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana LLAJ yang akan Dikerjasamakan;	1.0 Tahun	
							9. Dukungan Dalam Tahap Perencanaan, Penyiapan dan Transaksi Kegiatan KPBU Prasarana Transportasi Jalan;	1.0 Tahun	
							10. Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta;	1.0 Tahun	
							11. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Kerjasama Prasarana LLAJ;	1.0 Tahun	
							12. Bimbingan Teknis Bidang Kepengusahaan;	1.0 Tahun	
							13. Koordinasi Kelembagaan Dalam Negeri;	1.0 Tahun	
							14. Penyusunan SAKIP (LAKIP, LAPTAH, PK, PDDA, Renstra) dan Reformasi Birokrasi;	1.0 Tahun	
							15. Pembahasan Terpadu Penyusunan RKAKL Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025;	1.0 Tahun	
							16. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Prasarana Transportasi Jalan;	1.0 Tahun	
							17. Monitoring dan Evaluasi Aset Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;	1.0 Tahun	
							18. Monitoring Dukungan Angkutan Lebaran, Natal	1.0 Tahun	

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan Definisi		Satuan	Target PK 2024	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							dan Tahun Baru Terminal Tipe A, UPPKB, dan Rest Area; 19. Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI, Presiden RI, Serta Instansi Terkait; 20. <i>Inhouse Consultant</i> Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 21. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya) (Prioritas Nasional); 22. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subing) (Prioritas Nasional); 23. Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU Transit System dan ITS IKN; 24. Penyediaan Fasilitas Rest Area Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2024, Angkutan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025.	1.0 Tahun 1.0 Tahun 1.0 Kajian 1.0 Kajian 3.0 Rekomendasi Kebijakan 1.0 Paket	
5	SK. 1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan DEFINISI: 1. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, sebagaimana dijelaskan yaitu dalam melaksanakan pembinaan dan pemberian	Nilai	74	TATA USAHA : Layanan Perkantoran.	1.0 Layanan	Subbag Tata Usaha

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan Definisi		Satuan	Target PK 2024	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dukungan urusan, ketatausahaan, kerumatanggaan, serta penyiapan perencanaan dan keuangan. 2. Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai Direktorat Prasarana Transportasi Jalan yang bertempat di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan perkantoran di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan perkantoran di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan ujung tombak dalam pelayanan prima pada stakeholders (Pimpinan dan pegawai) di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebagai implikasi dari tugas dan fungsi yang diampu Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.					



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 022.03.1.352597/2024

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

Revisi ke 08
Tanggal : 21 Juni 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
- 2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Perhubungan Darat
- 3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
- 4. Kode>Nama Satker : (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
- Sebesar : Rp. 98.883.755.000 (SEMBILAN PULUH DELAPAN MILIAR DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
04 EKONOMI
04.08 TRANSPORTASI
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	98.883.755.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN JAKARTA IV (133) Rp. 98.883.755.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

JAKARTA, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

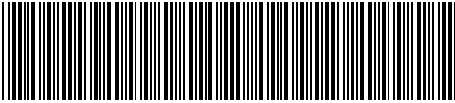
ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2024

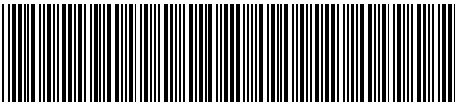


DS:2086-8042-3924-1680

Satker : (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

GA	Program Infrastruktur Konektivitas	Rp.	76.006.667.000
GA.4638	Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	37.828.186.000
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	38.178.481.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	22.877.088.000
WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	22.877.088.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2024
I A. INFORMASI KINERJA

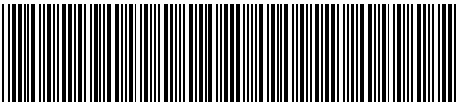


DS:2086-8042-3924-1680

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

Program	:	022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas			76.006.667.000
Kegiatan	:	4638	Pelayanan Transportasi Darat			37.828.186.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A			
	:	2. 01	Rata-rata persentase okupansi penumpang angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan			
	:	3. 02	Persentase penerapan SMART Terminal Tipe-A			
	:	4. 03	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP			
	:	5. 04	Rata-rata waktu operasional pelayanan angkutan penyeberangan			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4638.CAC	Sarana Bidang Konektivitas Darat	7,00	Unit, Paket	406.000.000
Rincian Output	:	01 CAC.028	Pengembangan Sistem Layanan Transportasi Darat	7.00	Unit	406.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4638.CBP	Prasarana Bidang Konektivitas Darat	76,00	Unit, Paket	37.422.186.000
Rincian Output	:	01 CBP.032	Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal	76.00	Unit	37.422.186.000
Kegiatan	:	4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat			38.178.481.000
	:	1. 01	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat			
Klasifikasi Rincian Output 3	:	4640.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	18,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	16.071.957.000
Rincian Output	:	01 ABF.001	Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana	18.00	Rekomendasi Kebijakan	16.071.957.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	4640.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	32,00	Laporan, Rekomendasi	13.606.524.000
Rincian Output	:	01 FAE.923	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	32.00	Laporan	13.606.524.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2024
I A. INFORMASI KINERJA



DS:2086-8042-3924-1680

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

Halaman : I A. 2

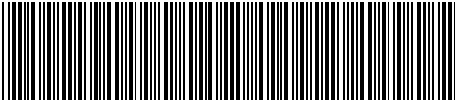
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4640.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		5,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	8.500.000.000
Rincian Output		:	01	PBF.209	Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya) (Prioritas Nasional) (PN)	1,00	Kajian	2.500.000.000
		:	02	PBF.210	Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subing) (Prioritas Nasional) (PN)	1,00	Kajian	2.500.000.000
		:	03	PBF.211	Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana (Dukungan IKN) (Prioritas Nasional) (PN)	3,00	Rekomendasi Kebijakan	3.500.000.000
Program		:	022.03.WA	Program Dukungan Manajemen				22.877.088.000
Kegiatan		:	4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat				22.877.088.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:						
Klasifikasi Rincian Output	1	:	4670.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	22.877.088.000
Rincian Output		:	01	EBA.994	Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	22.877.088.000

JAKARTA, 24 November 2023

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd.
Drs. Hendro Sugiatno, M.M.

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2024
I B. SUMBER DANA



DS:2086-8042-3924-1680

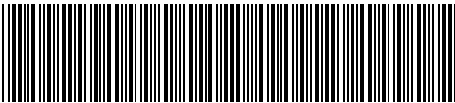
Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	98.883.755.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	98.883.755.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN



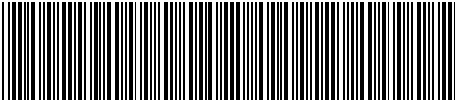
DS:2086-8042-3924-1680

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
352597	DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN	-	85.496.798	13.386.957	-	-	98.883.755	01 . 51	
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	-	62.619.710	13.386.957	-	-	76.006.667		
4638	Pelayanan Transportasi Darat	-	36.563.186	1.265.000	-	-	37.828.186		
4638.CAC	Sarana Bidang Konektivitas Darat (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	406.000	-	-	-	406.000		
01	RM	-	406.000	-	-	-	406.000		
4638.CBP	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	36.157.186	1.265.000	-	-	37.422.186		
01	RM	-	36.157.186	1.265.000	-	-	37.422.186		
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	-	26.056.524	12.121.957	-	-	38.178.481		
4640.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	6.450.000	9.621.957	-	-	16.071.957		
01	RM	-	6.450.000	9.621.957	-	-	16.071.957		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:2086-8042-3924-1680

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

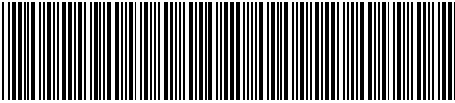
KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4640.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	13.606.524	-	-	-	13.606.524	01 . 51	
	01 RM	-	13.606.524	-	-	-	13.606.524	133@	
4640.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	6.000.000	2.500.000	-	-	8.500.000	01 . 51	
	01 RM	-	6.000.000	2.500.000	-	-	8.500.000	133	
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	-	22.877.088	-	-	-	22.877.088		
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	-	22.877.088	-	-	-	22.877.088		
4670.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	22.877.088	-	-	-	22.877.088	01 . 51	
	01 RM	-	22.877.088	-	-	-	22.877.088	133@	
JUMLAH		-	85.496.798	13.386.957	-	-	98.883.755		

JAKARTA, 24 November 2023

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd.
Drs. Hendro Sugiatno, M.M.

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:2086-8042-3924-1680

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

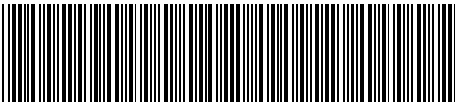
NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	352597	DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.779.869	2.724.360	4.299.275	4.873.859	8.897.806	9.444.223	6.357.217	9.562.795	9.266.720	22.192.649	6.806.446	12.678.535	98.883.755
		BELANJA BARANG	1.739.187	2.723.861	3.923.305	4.828.838	8.161.891	8.320.358	4.502.892	7.809.994	7.497.208	19.659.990	4.452.041	11.877.234	85.496.798
		BELANJA MODAL	40.682	500	375.970	45.021	735.915	1.123.865	1.854.325	1.752.802	1.769.512	2.532.659	2.354.405	801.301	13.386.957
		022.03.GA.4638 Pelayanan Transportasi Darat	1.203.500	14.779	977.452	1.331.856	4.274.165	5.424.270	1.734.366	631.699	3.859.726	16.955.570	280.471	1.140.330	37.828.186
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	1.162.818	14.279	944.411	1.286.835	4.129.684	5.246.319	1.675.739	618.661	3.729.254	16.382.413	270.990	1.101.783	36.563.186
		53 BELANJA MODAL	40.682	500	33.041	45.021	144.482	177.951	58.628	13.038	130.472	573.157	9.481	38.547	1.265.000
		022.03.GA.4640 Penunjang Teknis Transportasi Darat	381.262	1.914.656	2.025.771	775.801	1.659.324	3.115.892	4.496.866	5.137.290	4.266.274	5.083.234	6.352.363	2.969.748	38.178.481
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	381.262	1.914.656	1.682.842	775.801	1.067.891	2.169.978	2.701.168	3.397.526	2.627.234	3.123.733	4.007.439	2.206.995	26.056.524
		53 BELANJA MODAL	0	0	342.928	0	591.433	945.914	1.795.698	1.739.764	1.639.040	1.959.502	2.344.924	762.754	12.121.957
		022.03.WA.4670 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	195.107	794.926	1.296.052	2.766.203	2.964.317	904.060	125.985	3.793.806	1.140.720	153.844	173.612	8.568.456	22.877.088
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	195.107	794.926	1.296.052	2.766.203	2.964.317	904.060	125.985	3.793.806	1.140.720	153.844	173.612	8.568.456	22.877.088

JAKARTA, 24 November 2023

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd.
Drs. Hendro Sugiatno, M.M.

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2024
IV A. B L O K I R



DS:2086-8042-3924-1680

Kementerian Negara/Lembaga : [022] KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : [03] Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [352597] DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

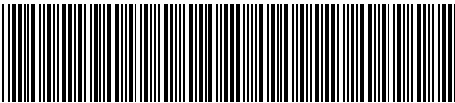
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
352597	DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN	022.03.WA	Disposisi: Automatic Adjustment
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 5.741.482	4670	Program Dukungan Manajemen
	52 Belanja Barang Rp. 5.741.482	4670.EBA	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas		Layanan Dukungan Manajemen Internal
4638	Pelayanan Transportasi Darat		521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja(RM)
4638.CBP	Prasarana Bidang Konektivitas Darat		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 366.528
	523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan(RM)		AA
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.000.000		Disposisi: Automatic Adjustment
	Automatic Adjustment		521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)
	Disposisi: Automatic Adjustment		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 170.000
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat		AA
4640.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		Disposisi: Automatic Adjustment
	521119 Belanja Barang Operasional Lainnya(RM)		522141 Belanja Sewa(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 300.000		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 401.400
	AA		AA
	Disposisi: Automatic Adjustment		Disposisi: Automatic Adjustment
4640.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	521211 Belanja Bahan(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 80.000
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 56.369		Automatic Adjustment
	Automatic Adjustment		Disposisi: Automatic Adjustment
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 30.000		
	AA		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.337.185		
	AA		

JAKARTA, 24 November 2023

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd.
Drs. Hendro Sugiatno, M.M.

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2024
IV B. C A T A T A N



DS:2086-8042-3924-1680

Kementerian Negara/Lembaga : [022] KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : [03] Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [352597] DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

JAKARTA, 24 November 2023

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd.
Drs. Hendro Sugiatno, M.M.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
PERHUBUNGAN DARAT

C-VII-46

Surat Dari	: Direktur Prasarana Transportasi Jalan (Dispo Dirjen Hubdat)
Nomor Surat	: 195/DPTJ/VII/2024
Tanggal Surat	: 02/07/24
Perihal	Permohonan Tanda Tangan Konsep revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dit. Prasarana Transportasi Jalan
Diterima Tanggal	: 05/07/24
Diterima Pukul	: 14 : 20 WIB
No Agenda	: C-VII-46

☐	KSD 1	SUBDIREKTORAT TERMINAL ANGKUTAN JALAN
☐	KSD 2	SUBDIREKTORAT PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR
☐	KSD 3	SUBDIREKTORAT FASILITAS PENDUKUNG DAN INTEGRASI MODA
☐	KSD 4	SUBDIREKTORAT KEPENGUSAHAAN PRASARANA
☒	KTU	KASUBBAG TATA USAHA
☐		SEKRETARIS SATKER
☐		PARA PPK
☐		SESPRI

ISI DISPOSISI

☒ Tindak Lanjuti	☐ Untuk Diketahui
☐ Tanggapan/Saran	☐ Untuk Dipelajari & Laporkan
☐ Harap Mewakili	☒ Untuk Diselsaikan & Laporkan
☐ Hadir Bersama Saya	☐ Untuk Dilaksanakan & Laporkan
☐ Siapkan Bahan	☐ Untuk Dikoordinasikan
☐ Jadwalkan	☐ Untuk Disiapkan
☐ Hadiri	☐ Sangat Segera
☐ Segera	☐ Untuk Ditanggapi

CATATAN DISPOSISI DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

- TL selesai dilakukan.
- Pantau progresnya. Th



TONI TAULADAN, S.Si., M.T.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta (10110)



LEMBAR DISPOSISI

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Darat			
Surat Diterima	Nomor Agenda	N.775/DJ/VII/2024	
	Diterima Tanggal	05-Jul-2024	
	Pukul	09:22 WIB	
	Dari	Dir. Prasarana Transportasi Jalan	
	Nomor Surat	195/DPTJ/VII/2024	
	Tanggal	24-Jun-2024	
	Perihal	Permohonan Tanda Tangan Konsep Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dit. Prasarana Transportasi Jalan	
DITERUSKAN KEPADA YTH :			
1.		SESDITJEN	
2.		DIR. LALULINTAS JALAN	
3.		DIR. ANGKUTAN JALAN	
4.		DIR. PRASARANA TRANSPORTASI JALAN	
5.		DIR. SARANA TRANSPORTASI JALAN	
6.		DIR. TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN	
7.		SPRI	
8.		ADC	
ISI DISPOSISI			
1.	Tindak Lanjuti	1.	Untuk Diketahui
2.	Tanggapan / Saran	2.	Untuk Dipelajari dan Laporkan
3.	Harap Mewakili	3.	Untuk Diselesaikan dan Laporkan
4.	Hadir Bersama Saya	4.	Untuk Dilaksanakan dan Laporkan
5.	Siapkan Bahan	5.	Untuk Dikoordinasikan
6.	Jadwalkan	6.	Untuk Diarsipkan

Catatan:



Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id

NOTA DINAS

Nomor 195/DPTJ/VII/2024

Kepada Yth. : Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Dari : Direktur Prasarana Transportasi Jalan
Hal : Permohonan Tanda Tangan Konsep Revisi I Perjanjian
Kinerja Tahun 2024 Direktorat Prasarana Transportasi
Jalan
Tanggal : 24 Juni 2024

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor UM.207/38/14/DJPD/2024 tanggal 14 Juni 2024 perihal Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024, Bimbingan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Bimbingan Teknis Penyesuaian pada Aplikasi E-Performance, Penyusunan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Penyusunan Revisi Renaksi Tahun 2024, Persiapan Evaluasi AKIP 2024 atas Implementasi SAKIP 2023 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, bersama ini terlampir disampaikan konsep Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

Demikian disampaikan, mohon arahan lebih lanjut.

Toni Tauladan, S.Si., M.T. ^u
NIP. 19700910 199703 1 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN



ditjen_hubdat



hubdat151



Ditjen Perhubungan Darat



hubdat.dephub.go.id